

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia setelah China dan India. Dalam satu tahun, jumlah penduduk Indonesia mengalami lonjakan sebesar 1,49 persen. Ini artinya penambahan penduduk Indonesia setara dengan jumlah penduduk Singapura. Berdasar data yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, jumlah penduduk Indonesia per 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa. Maka dalam satu tahun penduduk Indonesia bertambah sekitar 4 juta jiwa, sebagaimana dikatakan Kepala BKKBN Pusat dr Surya Chandra. Artinya, di bulan Juli 2017 jumlah penduduk Indonesia lebih dari 262 juta jiwa. (<http://jogja.tribunnews.com/2017/08/02/hingga-juli-2017-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-jadi-262-juta-jiwa-lebih> diakses pada 26 September 2017).

Berdasarkan jumlah penduduk yang amat banyak tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial di masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, tindakan kriminal, pendidikan dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya dilihat dari kinerja pemerintah, namun juga kualitas masyarakat yang ada. Jika ingin mengatasi permasalahan

sosial yang ada, maka harus dilihat dari satuan terkecil lingkungan sosial yaitu keluarga.

Keluarga (*family*) merupakan sebuah konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga, dalam konteks sosiologi, dianggap sebagai suatu institusi sosial yang sekaligus menjadi suatu sistem sosial yang ada di setiap kebudayaan. Sebagai sebuah institusi sosial terkecil, keluarga merupakan kumpulan dari sekelompok orang yang mempunyai hubungan atas dasar pernikahan, keturunan, atau adopsi serta tinggal bersama di rumah tangga biasa (Zastrow, 2006). Sementara itu, keluarga juga didefinisikan sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan (suami-istri) serta hubungan darah (anak kandung) atau adopsi (anak angkat/pungut) (Burgess dan Locke dalam Sunarti, 2006). (<http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf> diakses pada 27 September 2017). Melalui keluarga, kualitas diri seseorang dibentuk sejak kecil, kemudian akan berkembang seiring dengan lingkungan sekitarnya seperti sekolah dan masyarakat sekitar tempat tinggalnya.

Pembentukan karakter dan sikap pada seseorang yang dimulai dari keluarga inilah yang membuat keluarga diharuskan memiliki ketahanan. Ketahanan individu dan keluarga akan berakibat pada terjaminnya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan

ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Pentingnya ketahanan keluarga tentunya akan berdampak pada ketahanan nasional. Ketahanan keluarga sendiri meliputi ketahanan fisik, ekonomi, serta ketahanan sosial. Ketahanan keluarga ini tentunya dapat terbentuk dari pasangan yang membangun rumah tangga. <http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/9455b-buku-pembangunan-ketahanan-keluarga-2016.pdf> diakses pada 27 September 2017)

Berbagai persoalan dapat muncul jika keluarga tidak memiliki ketahanan, mulai dari tidak tercukupinya ekonomi keluarga, kesehatan, hingga keharmonisan keluarga. Beberapa hal memicu sulitnya menciptakan ketahanan keluarga, diantaranya adalah ketidaksiapan pasangan dalam membangun rumah tangga atau keluarga tersebut. Ketidaksiapan ini salah satunya dapat diakibatkan karena terjadinya pernikahan yang tidak diinginkan ataupun pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencukupi usia yang dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia tentang perkawinan menjelaskan tentang definisi umur anak dalam Undang-undang (UU) Pemilu No.10 tahun 2008 (pasal 19, ayat1) hingga berusia 17 tahun. Sedangkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menjelaskan batas usia minimal menikah bagi perempuan 16 tahun dan lelaki 19 tahun.

Pernikahan dini bukan hanya fenomena terjadinya pernikahan anak dibawah umur, namun juga memiliki banyak akibat yang dapat ditimbulkan, diantaranya

kemiskinan, angka persalinan ibu dibawah umur yang tinggi, kematian bayi, kematian ibu, kekerasan dalam rumah tangga, hingga dapat berujung pada perceraian karena tidak mampu dalam membangun ketahanan keluarga.

Salah satu masalah yang menjadi perhatian pemerintah di lingkungan masyarakat saat ini adalah banyaknya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Catatan tahunan Komnas Perempuan pada Maret 2017, terdapat 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2016, yang terdiri dari 245.548 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama, serta 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra penyedia layanan, tersebar di 34 Provinsi.

Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Data PA sejumlah 245.548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.602 kasus yang masuk dari lembaga mitra penyedia layanan, kekerasan yang terjadi di ranah personal tercatat 75% atau 10.205 kasus. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan lewat juga menunjukkan trend yang sama, KDRT/RP Lain menempati posisi kasus yang paling banyak di adukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk. (<https://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/> diakses pada 16 Agustus 2017)

Selain terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini juga mengakibatkan tingginya angka persalinan ibu dibawah umur. Hal ini tentunya membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi. Penting untuk diketahui bahwa kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonate ( *kematian* bayi yang lahir hidup dalam rentang waktu 28 hari sejak kelahiran) <https://saripediatri.org/index.php/sari-pediatri/article/view/607/542> diakses pada 29 september 2017)

Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 305 untuk setiap 100 ribu kelahiran. Angka itu meningkat tajam dari target pemerintah yang ditetapkan sebelumnya, yaitu maksimal 102 kasus kematian ibu melahirkan per 100 ribu kelahiran. Dalam sebuah diskusi mengenai pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi di

Yogyakarta, Rabu (28/12) siang, dr Detty Siti Nurdiati, MPH., PhD, SpOG(K) dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta menampilkan sejumlah data menarik.

Data hasil penelitian itu menyebutkan, ada sejumlah penyebab tingginya angka kematian ibu melahirkan. Sekitar enam persen kematian karena hipertensi, 37 persen karena anemia, menikah muda 48 persen dan hamil pada usia di bawah 20 tahun, 38 persen. Artinya, kata dokter Detty, pernikahan usia remaja menyumbang prosentase cukup tinggi dalam kasus ini.

“Periode kematian sebagian besar adalah postpartum, yaitu dalam 40 jam pertama setelah lahir. Yang menikah pada usia 10-16 tahun itu 20,3 persen, kemudian yang menikah 17-19 tahun itu 35 persen, jadi artinya penyebab langsung dan penyebab tidak langsung tidak terjadi bersamaan. Mungkin inilah yang menyebabkan kematian maternal, atau kematian ibu di Indonesia itu bukannya turun tetapi malah naik,” kata dokter Detty Siti Nurdiati.

(<https://www.voaindonesia.com/a/pernikahan-remaja-dan-kasus-kematian-ibu-melahirkan-di-indonesia/3653855.html> diakses pada 26 oktober 2017)

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, kasus pernikahan dini masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan proyeksi Bappenas, jumlah remaja pada tahun 2015 adalah 66 juta jiwa atau sekitar 27 % dari total penduduk. di Yogyakarta, remaja mewakili sekitar 24 % populasi atau sekitar 882.900 orang dari total penduduk DIY yang berjumlah 3.679.176 orang (BPS, 2015). Pada tahun 2014 data yang diperoleh BPPM DIY, pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja mencapai 482 kasus, angka persalinan pada remaja mencapai 1082 kasus, hingga kehamilan yang tak diinginkan mencapai 976 kasus. Di DIY, kasus pernikahan dini paling banyak terjadi di Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11,29 persen, diikuti Kota Yogyakarta 7,79 persen, Bantul 7,30 persen, Kulonprogo 7,28 persen, dan Sleman 5,07 persen.

(<http://m.metrotvnews.com/jateng/peristiwa>

[/4KZVgwpK-indonesia-kamboja-penyumbang-tertinggi-pernikahan-dini](#) diakses pada 26 Oktober 2017).

Bukan hanya jumlah angka pernikahan dini yang paling tinggi, gunung, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DIY, Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di DIY.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta, 2014 -2015/Number of Poor People and Poverty Line by Regency/City in D I Yogyakarta, 2014-2015**

Kabupaten/Kota/ Regency/City	Sep-14		
	Garis Kemiskinan/ Poverty Line (Rp/kap/bulan Rp/cap/month)	Miskin/ Poor People Jumlah/ Total	%
1 Kulonprogo	265 575	84,67	20,64
2 Bantul	301 986	153,49	15,89
3 Gunungkidul	243 847	148,39	20,83
4 Sleman	306 961	110,44	9,5
5 Yogyakarta	366 520	36,6	8,67
<b>DIY</b>	<b>321 056</b>	<b>532,59</b>	<b>14,55</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta

Tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul ini erat kaitannya dengan masalah ekonomi. Warga berpikir bahwa dengan menikahkan anak mereka, maka beban atau tanggungan ekonomi keluarga akan berkurang. Padahal pemikiran ini tentu keliru. Jika anak yang dinikahkan belum cukup umur

dan belum mampu memikul tanggungjawabnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka ini dapat menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks. Angka kemiskinan bukannya berkurang justru malah akan bertambah. Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Dr. Umi Listyaningsih, M.Si. mengingatkan bahwa kemiskinan sebetulnya bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi terjadinya PUD (Pernikahan Usia Dini). Tingkat partisipasi pendidikan yang rendah dan budaya menjadi faktor lain yang perlu untuk diperhatikan pula. Beberapa remaja di Gunungkidul misalnya, melakukan PUD bukan karena telah hamil di luar nikah.

Orang tua beranggapan, setelah menikahkan anaknya maka beban ekonomi keluarga akan berkurang, namun kenyataannya tidak demikian. Saat pasangan PUD memiliki anak, pengasuhannya pun akhirnya diserahkan kepada orang tua karena jiwa dan pemikiran mereka yang masih kekanak-kanakan. Fondasi ekonomi keluarga muda ini sangat rapuh atau dengan kata lain, PUD mendorong munculnya keluarga miskin baru, kata Umi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kabupaten Gunungkidul, di Semanu, Rabu (16/12). (<http://cpps.ugm.ac.id/ada-political-will-kecamatan-saptosari-sukses-tekan-angka-pernikahan-usia-dini/> diakses pada 20 september 2017)

Namun di balik tingginya kasus pernikahan dini di Gunung Kidul, pemerintah terus melakukan upaya untuk menurunkan angka tersebut. Gunungkidul masuk Top 99 dari 3.413 daerah dalam lomba inovasi yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN-RB RI tahun 2017. Hal yang diusung terkait dengan kampanye penundaan pernikahan usia dini. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan bupati, Badingah yang diwakili oleh wakil bupati, Immawan Wahyudi pada

puncak peringatan Hari Kartini Tingkat Kabupaten Gunungkidul di kompleks Balai Desa Selang, Kecamatan Wonosari, Kamis (27/04/2017).

Menurut Badingah, posisi top tersebut tak luput dari komitmen bersama antara pemerintah dan semua elemen masyarakat khususnya tingkat keluarga dan padukuhan dalam menekan angka pernikahan usia dini. Kecamatan Gedangsari dan Saptosari sebelumnya merupakan daerah dengan angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi, namun bisa ditekan hingga menjadi 0 persen. (<http://gunungkidul.sorot.co/berita-92990-sukses-kampanye-tunda-nikah-dini-gunungkidul-masuk-top-99.html> diakses pada 26 Oktober 2017)

Hal ini tentunya sangat membanggakan, melihat 2 kecamatan berhasil meniadakan pernikahan dini. Dari 2 kecamatan tersebut, Saptosari merupakan kecamatan yang tergolong miskin. Ini merupakan suatu hal yang unik, karena meskipun berada dalam kemiskinan, Pemerintah Kecamatan saptosari tetap dapat melaksanakan program deklarasi guna menuntaskan kasus pernikahan dini yang terjadi.

Separuh dari total 18 kecamatan di Gunungkidul masih dinyatakan sebagai kecamatan miskin, meski saat ini perekonomian di wilayah tersebut sudah menggeliat. Kecamatan-kecamatan yang dinyatakan masih miskin di antaranya Wonosari, Karangmojo, Playen, Semin, Ngawen, Patuk, Saptosari, Ponjong dan Nglipar. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Maman Suherman, mengatakan penetapan sembilan kecamatan miskin tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS). (<http://jogja.tribunnews.com/2016/03/23/setengah-wilayah-gunungkidul-masih-tercatat-sebagai-daerah-miskin> diakses pada 09 November 2017)

Kecamatan Saptosari merupakan salah satu kecamatan yang berhasil mengatasi masalah pernikahan dini hingga turun menjadi 0 kasus. Keberhasilan dalam menanggulangi pernikahan dini ini ternyata dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Saptosari. Berdasarkan wawancara dengan Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP, MSi. Menjelaskan bahwa tahun 2013, kecamatan Saptosari merupakan kecamatan yang paling miskin diantara 18 kecamatan yang ada di Gunung Kidul. Kemiskinan tersebut menimbulkan banyak masalah lain diantaranya gizi buruk dan angka kematian bayi tinggi. Pernikahan dini juga mengakibatkan mengapa angka kemiskinan di Saptosari tinggi. Hal ini dikarenakan anak-anak yang baru menikah dan belum memiliki pekerjaan akan menambah KK (Kartu Keluarga) miskin yang baru. Jarot menjelaskan pernikahan dini terjadi dikarenakan beberapa sebab.

Waktu itu yang menikah untuk usia dibawah 16 tahun untuk putri dan 19 tahun untuk putra serta perlu dispensasi pengadilan agama itu mencapai 19 kasus. Ada yang berumur 12 tahun, 13 tahun, baru lulus SD sudah dinikahkan. Dari sana kami evaluasi, kemudian kami coba telusuri ke desa-desa, kenapa sebabnya nikah dini bisa tinggi sekali. Kemudian setelah kami identifikasi ternyata ada 2 sebab. Pertama dari budaya lokal yaitu budaya kebiasaan masyarakat, kalau punya anak perempuan itu segera dinikahkan, lebih cepat lebih baik, terutama disini ada budaya diselenggarakan pesta saat menikahkannya anaknya, saat pesta diadakan mereka akan mendapatkan amplop, karena itu mereka segera mengadakan pernikahan. Kemudian faktor kedua adalah pergaulan bebas. (wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP, MSi pada 18 September 2017)

Berdasarkan pengamatan tersebut, Jarot mengumpulkan berbagai tokoh dan elemen masyarakat untuk membahas bagaimana cara mengatasi kasus pernikahan dini yang tinggi tersebut. Dibantu dengan LSM Rifka Anisa, kecamatan Saptosari akhirnya membentuk deklarasi untuk tidak mengizinkan terjadinya pernikahan dini kembali. Deklarasi merupakan kegiatan dimana para peserta deklarasi dikumpulkan pada suatu acara dengan mengucapkan bersama-sama kalimat yang berisikan komitmen menghentikan pernikahan dini. Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan setelah deklarasi diucapkan. Deklarasi tersebut didukung oleh berbagai elemen, yaitu KUA, Puskesmas, Kepala Desa, Lurah, serta seluruh sekolah. Pelaksanaan deklarasi sendiri dilakukan melalui berbagai tahapan hingga pada akhirnya angka pernikahan dini di Saptosari turun menjadi nol persen.

Kami bertekad untuk menekan pernikahan dini dengan berbagai elemen, dengan dibantu LSM Rifka Anisa juga. Kemudian kami swadaya dengan KUA, seluruh pejabat kecamatan, dan desa. Semua tokoh menghadiri dan tanda tangan. Kemudian setelah itu kita tindak lanjuti dengan deklarasi di tingkat desa, dengan pak Dukuh, tokoh masyarakat, deklarasi bahwa tidak akan mengizinkan pernikahan dini. Kami juga melakukan deklarasi di sekolah, terutama SMP, karena yang rawan itu siswa SMP karena SMA justru sudah agak dewasa. Di semua SMP Saptosari kita deklarasi, semua orang tua diundang, kemudian anak-anak melakukan deklarasi dengan menandatangani surat kemudian orang tua, kepala sekolah, dan saya. Yang ditingkat kecamatan itu deklarasi untuk umum, kemudian di sekolah, ternyata hasilnya luar biasa. Dari tahun 2013 yang kasusnya ada 19, kemudian turun menjadi 7, tahun berikutnya 2, dan kemudian tidak ada lagi. (wawancara Camat Saptosari, Jarot Hadiatmojo, SIP, MSi pada 18 September 2017)

Dalam pelaksanaan deklarasi, tidak hanya pengucapan perjanjian untuk pencegahan pernikahan dini saja yang dilakukan, namun juga terdapat sosialisasi dan edukasi yang dilakukan sehingga masyarakat dapat memahami mengapa pernikahan dini perlu untuk dihentikan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Saptosari, angka dispensasi pernikahan dini mengalami penurunan. Hal tersebut terlihat signifikan pada tahun 2014 dan 2015, dimana deklarasi mulai dilakukan oleh seluruh Muspika, Kades dan Dukuh di Kecamatan Saptosari. Data tersebut dapat dilihat pada table berikut.

**Tabel 1.2**

**Data Dispensasi Pernikahan 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Dispensasi Pernikahan Dini</b>
2012	6
2013	19
2014	7
2015	2
2016	0

Sumber : Data KUA Kecamatan saptosari

Menurut Ali Imron, di dalam undang-undang perkawinan juga mengatur perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Karena sesuatu hal sehingga persyaratan umur ini tidak dapat dipenuhi maka dispensasi perkawinan dapat dimintakan oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekwensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril atau materil dan lain sebagainya. Selain itu ada pula alasan dimana calon mempelai perempuan telah hamil sehingga menjadi alasan mengajukan dispensasi perkawinan. (<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/601/718> diakses pada 19 April 2018)

Selain menurunnya angka dispensasi pernikahan di KUA Kecamatan Saptosari, data dari Puskesmas Saptosari juga menunjukkan beberapa kasus seperti kematian ibu dan bayi serta ibu yang hamil dibawah usia 20 tahun mengalami penurunan.

**Tabel 1.3**  
**Data Kehamilan**

<b>Kasus</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Kematian Bayi	11	7	7
Kematian Ibu	-	1	1
Ibu Hamil Anemia	187	222	102
Ibu Hamil Dibawah Usia 20th		159	86

Sumber : <http://kabarhandayani.com/saptosari-ada-34-kasus-pernikahan-dini-selama-3-tahun-terakhir/> diakses pada 29 september 2017

Berdasarkan keberhasilan Kecamatan Saptosari tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana strategi kampanye kecamatan Saptosari dalam menanggulangi kasus pernikahan dini hingga dapat berhasil menurunkan angka pernikahan dini menjadi nol persen serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu bagaimana strategi kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi oleh pemerintah kecamatan Saptosari kabupaten Gunung Kidul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Angka pernikahan dini di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini masih tinggi, perlu usaha dari banyak pihak dan elemen masyarakat dalam menanggulangnya agar dapat mencegah kasus-kasus akibat dari pernikahan dini terjadi, seperti perceraian, persalinan terlalu muda, serta angka kematian ibu dan bayi.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan bagaimana strategi kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Saptosari.
2. Mendeskripsikan tanggapan masyarakat Saptosari tentang strategi kampanye pencegahan pernikahan dini, perceraian, dan penurunan angka kematian ibu dan bayi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Saptosari.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dan bahan referensi bagi mahasiswa yang berkepentingan untuk mengembangkan penelitian dalam ilmu komunikasi, khususnya strategi kampanye yang dilakukan pemerintah dalam mengubah sikap dan pandangan masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Kecamatan Saptosari

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kecamatan saptosari sebagai evaluasi dan tolak ukur akan pencapaian strategi pencegahan pernikahan dini.

### b. Bagi Pemerintah Daerah lainnya

Sebagai masukan bagi pemerintahan daerah lainnya dalam menanggulangi kasus pernikahan dini yang masih terjadi dengan jumlah yang tinggi di beberapa daerah di Indonesia.

## **E. Kajian Teori**

### **1. Strategi Kampanye**

Hamel dan Prahalad (1995) dalam Umar (2003:31) Strategi merupakan tindakan yang bersifat senantiasa meningkat/incremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh pelanggan dimana datang. Jadi strategi seringkali dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya. Komunikasi secara efektif dan strategis pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mengubah sikap (*how to change the attitude*)
- b. Mengubah opini (*to change the opinion*)
- c. Mengubah perilaku (*to change behaviour*)

Menurut Venus (2012:152), Strategi kampanye merupakan pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam kampanye, atau lebih mudahnya dapat disebut sebagai *guiding principle*, atau *the big idea*. *Guiding principle* atau *the big idea* ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang diambil untuk menuju pada suatu kondisi tertentu dari posisi saat ini, yang dibuat berdasarkan analisis masalah dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kampanye sendiri memiliki arti suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan (*A campaign is conscious, sustained and incremental process designed to be implemented over a specified periode of time for the purpose of influencing a specified audience*). (Pfau dan Parrot, 1993, dalam Antar Venus : Manajemen Kampanye Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004 dalam Liliweri, 2011:676).

Kemudian Rogers dan Storey (1987) dalam Venus (2012:7) juga mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Merujuk pada definisi ini maka setiap aktivitas kampanye komunikasi setidaknya harus mengandung empat hal yakni (1) tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu (2) jumlah khalayak sasaran yang besar (3) biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu dan (4) melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Menurut Alo Liliweri (2011 : 676), Kampanye merupakan kegiatan komunikasi publik yang dilakukan secara berencana yang bertujuan untuk :

- a. Memobilisasi dan melibatkan orang-orang untuk terlibat dalam menyebarkan informasi tertulis melalui media atau media tidak tertulis (langsung dengan publik) untuk mencegah dan mendorong sikap individu atau publik untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan tertentu demi kesejahteraan individu maupun publik pada umumnya
- b. Memberikan tekanan kepada para pemegang kekuasaan atau kewenangan dari para pembuat keputusan (*pressuring decision makers*) untuk mencari solusi yang bermanfaat bagi kesejahteraan individu atau publik pada umumnya
- c. Menginformasikan dan memberikan pendudukan kepada individu atau publik
- d. Melakukan perubahan terhadap perilaku dan sikap demi kesejahteraan hidup

- e. Mempersuasi orang-orang untuk mengerti, memahami, dan melakukan suatu tindakan tertentu

## **2. Perencanaan Kampanye**

Perencanaan kampanye merupakan tahap awal dalam proses strategi kampanye. Fungsi utama perencanaan dalam kampanye adalah menciptakan keteraturan dan kejelasan arah tindakan. Ada beberapa alasan mengapa sebuah perencanaan harus dilakukan dalam sebuah kampanye (Gregory,2000 : Simmons,1990, dalam Venus,2012:144) yaitu :

- a. Memfokuskan usaha

Perencanaan membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai dengan benar hingga akhirnya pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien, karena berkonsentrasi pada prioritas dan alur kerja yang jelas

- b. Mengembangkan sudut pandang berjangka waktu panjang

Perencanaan membuat tim kampanye melihat semua komponen secara menyeluruh. Ini akan membuat tim kampanye tidak berpikir mengenai efek kampanye dalam jangka waktu yang pendek tapi juga masa depan, hingga mendorong dihasilkannya program yang terstruktur dalam menghadapi kebutuhan masa depan.

c. Meminimalisasi kegagalan

Perencanaan yang cermat dan teliti akan menghasilkan alur serta tahapan kerja yang jelas, terukur dan spesifik serta lengkap dengan langkah-langkah alternatif, sehingga bila ada kegagalan bisa langsung diambil alternatif penyelesaian.

d. Mengurangi konflik

Konflik kepentingan dan prioritas merupakan hal yang sering terjadi dalam sebuah kerja tim. Perencanaan yang matang akan mengurangi potensi munculnya konflik, karena sudah ada bentuk tertulis mengenai alur serta prioritas pekerjaan untuk tiap-tiap anggota tim.

e. Memperlancar kerjasama dengan pihak lain

Sebuah rencana yang matang akan memunculkan rasa percaya para pendukung potensial serta media yang akan digunakan sebagai saluran kampanye, hingga pada akhirnya akan terjalin kerjasama dengan baik dan lancar.

Alo Liliweri (2011:688) menyatakan terdapat 8 tahapan dalam menyusun perencanaan kampanye atau yang sering disebut strategi kampanye. Tahapan-tahapan tersebut dipaparkan dengan bentuk pertanyaan agar lebih mudah memahami dalam menyusun setiap tahapan perencanaannya.

Gambar 1. 1

### Tahap perencanaan Strategi Kampanye



(Sumber : Alo Liliweri, Komunikasi Serba Ada Serba Makna, 2011)

1. Langkah pertama : Analisa Masalah, untuk menjawab pertanyaan :  
“apa itu masalah atau isu?”
2. Langkah kedua : Tujuan dan Sasaran, untuk menjawab pertanyaan :  
“apa yang ingin dicapai?”
3. Langkah ketiga : Siapakah yang Menjadi Stakeholder?, untuk menjawab pertanyaan : “siapakah yang akan dijadikan sebagai sasaran dari tujuan kampanye?”
4. Langkah keempat : Pesan, untuk menjawab pertanyaan : “apa yang kita inginkan untuk khalayak dengarkan?”

5. Langkah kelima : Taktik, untuk menjawab pertanyaan : “bagaimana anda mengetahui bahwa audiens mendengarkan pesan-pesan anda?”
6. Langkah keenam : Messenger (Pemesan), untuk menjawab pertanyaan : “siapa yang audiens ingin dengarkan?”
7. Langkah ketujuh : Sumber daya, untuk menjawab pertanyaan “seberapa banyak kampanye kita membutuhkan sumber daya?”
8. Langkah kedelapan : Assessment, untuk menjawab pertanyaan : “bagaimana anda dapat mengetahui seluruh proses aktivitas kampanye?”

### **3. Pelaksanaan Kampanye**

Venus (2012:199) menjelaskan pelaksanaan kampanye adalah penerapan dari konstruksi rancangan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena sifatnya yang demikian maka proses pelaksanaan harus secara konsisten berpedoman kepada rancangan yang ada tanpa mengabaikan penyesuaian yang perlu dilakukan sesuai dengan kenyataan lapangan yang dihadapi. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap pelaksanaan meliputi : realisasi unsur – unsur pokok kampanye, menguji coba rencana kampanye, pemantauan pelaksanaan, dan pembuatan laporan kemajuan.

a. Realisasi unsur – unsur pokok kampanye

1) Perekrutan dan pelatihan personel kampanye

Kegiatan kampanye merupakan kerja tim. Penentuan siapa saja yang akan terlibat sebagai pelaksana kampanye (*campaign organizer*) merupakan langkah awal dalam melaksanakan kampanye. Orang-orang yang akan menjadi personel kampanye harus diseleksi dengan teliti dengan memperhatikan aspek motivasi, komitmen, kemampuan bekerjasama, dan pengalaman yang bersangkutan dalam kerja sejenis.

2) Mengkonstruksi pesan

Pada prinsipnya desain pesan kampanye harus sejalan dengan karakteristik khalayak sasaran, saluran yang digunakan, dan efek kampanye yang diharapkan. Pesan kampanye memiliki berbagai dimensi yang meliputi pesan verbal, nonverbal, dan visual. Namun apapun dimensinya, secara umum konstruksi pesan kampanye harus didasarkan pada pertimbangan kesederhanaan (*simplicity*), kedekatan (*familiarity*) dengan situasi khalayak, kejelasan (*clarity*), keringkasan (*conciseness*), kebaruan (*novelty*), konsistensi, kesopanan (*courtesy*) dan kesesuaian dengan objek kampanye.

Dalam mengkonstruksi pesan kita juga dapat merujuk pada saran-saran para ahli kampanye. Terris (Pfau dan Parrot, 1993

dalam Venus, 2012:202) menyarankan konstruksi pesan yang lebih bersifat personal -yang seolah-olah ditujukan untuk setiap individu- untuk memotivasi khalayak yang apatis. Dengan begitu mereka merasa diperhatikan. Sedangkan untuk khalayak yang menyangsikan kebenaran isi pesan kampanye, Hample (Stiff, 1992 dalam Venus, 2012:202) menyarankan konstruksi pesan harus melibatkan argumentasi logis dan bukti-bukti atau temuan ilmiah.

### 3) Menyeleksi penyampai pesan kampanye

Pelaksanaan kampanye juga menghendaki pelaksana kampanye berhadapan dengan pemilihan individu yang secara spesifik bertindak sebagai pelaku (campaign actor) yang menyampaikan pesan kampanye. Pada umumnya faktor pokok yang harus diperhatikan dalam menyeleksi pelaku kampanye adalah kesesuaian tokoh tersebut dengan objek kampanye, media yang digunakan, dan kredibilitas yang bersangkutan di mata publik. Objek kampanye umumnya dijadikan dasar pertimbangan pertama dalam menetapkan penyampai pesan kampanye.

### 4) Menyeleksi saluran kampanye

Menyeleksi media mana yang akan dijadikan saluran kampanye harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Beberapa faktor pokok yang perlu dipertimbangkan dalam

pemilihan media kampanye diantaranya : jangkauan media, tipe dan ukuran besarnya khalayak, biaya, waktu, dan tujuan serta objek kampanye. Di samping itu faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah karakteristik khalayak, baik secara demografis, psikografis, maupun geografis. Pola penggunaan media khalayak (media habit) juga harus diperhitungkan untuk memastikan media apa yang biasanya digunakan khalayak.

b. Uji coba kampanye

Uji coba terhadap suatu rancangan dilakukan untuk menyusun strategi (pesan, media, dan penyampaian pesan) yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Lewat uji coba rencana kampanye kita juga akan memperoleh gambaran tentang respons awal sebagian khalayak sasaran terhadap pesan-pesan kampanye. Respons ini pada gilirannya akan digunakan sebagai pembanding ketika melakukan evaluasi proses dan akhir kampanye.

c. Tindakan dan pemantauan kampanye

Sebagai sebuah kegiatan yang terprogram dan direncanakan dengan baik, maka segala tindakan dalam kampanye harus dipantau agar tidak keluar dari arah yang ditetapkan. Untuk itu harus dipahami bahwa tindakan kampanye bukanlah tindakan yang kaku dan parsial, tetapi bersifat adaptif, antisipatif, integratif, dan berorientasi pada pemecahan masalah.

1) Adaptif

Tindakan kampanye yang bersifat adaptif artinya ia terbuka terhadap masukan-masukan baru atau bukti-bukti baru yang ditemukan di lapangan. Sumber informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan penyesuaian tindakan adalah buku harian kampanye dan laporan kemajuan (*progress repport*) yang dibuat secara berkala.

2) Antisipatif

Tindakan kampanye bersifat antisipatif maksudnya kegiatan kampanye harus memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan muncul di lapangan saat kampanye dilakukan. Dengan bersifat antisipatif pelaku kampanye telah mempersiapkan berbagai alternatif pemecahan masalah terhadap masalah-masalah yang mungkin timbul.

3) Orientasi pemecahan masalah

Tindakan kampanye bersifat *problem solving oriented* artinya segala bentuk tindakan dalam proses kampanye diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Bila dalam upaya tersebut muncul permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan, maka yang harus muncul pertama kali dalam benak pelaku kampanye adalah 'bagaimana cara memecahkan

masalah tersebut', pelaku kampanye tidak boleh larut memikirkan masalah tanpa mencari solusi.

#### 4) Integrative dan koordinatif

Keberhasilan kampanye ditentukan oleh bagaimana pelaksana kampanye bertindak secara integratif dan koordinatif. Disini manajer kampanye membutuhkan sebuah sistem untuk dapat tetap berhubungan dan berkoordinasi dengan tim pelaksana kampanye, lewat sistem seperti itu maka perkembangan dan pelaksanaan kegiatan kampanye dapat terpantau secara rutin dan sistematis.

Pemantauan (monitoring) pelaksanaan kampanye pada prinsipnya sama dengan evaluasi proses yaitu suatu evaluasi yang dilaksanakan ketika kampanye sedang berlangsung. Metode yang digunakan untuk kegiatan pemantauan ini diantaranya meliputi penggunaan dan updating buku harian kampanye, melaksanakan pertemuan-pertemuan staff untuk memperoleh umpan balik, pengamatan operasional kampanye, membuat progress report, dan melakukan sesi wawancara untuk mengumpulkan detail informasi yang seringkali tidak terungkap dalam rapat atau pertemuan staff kampanye.

#### d. Laporan Kemajuan

Unsur terakhir dari proses pelaksanaan kampanye adalah penjadwalan laporan kemajuan atau progress report. Laporan kemajuan merupakan dokumen yang sangat penting, bukan hanya bagi manajer tapi juga pelaksana kampanye secara keseluruhan. Dalam laporan kemajuan umumnya dimuat berbagai data dan fakta tentang berbagai hal yang telah dilakukan selama masa kampanye. Data yang disajikan umumnya bukan hanya berkaitan realisasi rencana kampanye tapi juga mencakup berbagai temuan lapangan baik yang positif atau negatif. Dengan demikian laporan kemajuan menyediakan semacam evaluasi kecil yang bersifat rutin terhadap berbagai proses kampanye yang sedang berjalan.

#### **4. Evaluasi Kampanye**

Evaluasi adalah komponen terakhir dari rangkaian proses pengelolaan kampanye. Evaluasi kampanye diartikan sebagai upaya sistematis untuk menilai berbagai aspek yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan kampanye. Dari definisi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi kampanye tidak hanya dilakukan saat kampanye telah berakhir, namun juga ketika kampanye tersebut masih berlangsung. (Venus, 2012:209-210). Evaluasi kampanye merupakan kegiatan untuk memeriksa kembali apakah “segala sesuatu” yang telah dilaksanakan atau yang

diimplementasikan itu sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya (Liliweri, 2011:729).

a. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan ketika suatu program sedang berlangsung, jenis evaluasi ini berbeda dengan evaluasi sumatif yang dilaksanakan setelah program selesai. Tujuan evaluasi formatif adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan (1) strategi kampanye, dan (2) materi kampanye – sebelum kampanye diimplementasikan. Sekurang-kurangnya evaluasi formatif akan menjawab tiga pertanyaan utama sebagai berikut :

- 1) Bagaimana target audiens berpikir tentang isu-isu kampanye?
- 2) Pesan-pesan kampanye apakah yang terasa cocok sehingga berpengaruh terhadap audiens?
- 3) Siapakah yang dinilai sebagai pengirim pesan yang paling baik selama kampanye berlangsung?

Pada umumnya informasi untuk pelaksanaan evaluasi formatif ini bersumber dari hasil uji publik, catatan pengawas tim kampanye, wawancara dan diskusi dengan individu atau kelompok peserta kampanye. Manfaat dari evaluasi formatif ini adalah untuk merumuskan sebagian perubahan atas pelaksanaan tahapan kampanye berikutnya.

b. Evaluasi Proses

Evaluasi proses bertujuan untuk mengukur usaha dan output langsung dari kampanye, apa dan bagaimana seluruh rangkaian proses kampanye itu dijalankan. Menguji implementasi kampanye dan bagaimana para aktivis terlibat dan bekerja dalam kampanye. Sekurang-kurangnya ada 3 aspek yang perlu dievaluasi, yaitu :

- 1) Berapa banyak material yang telah dikeluarkan?
- 2) Apa yang telah dicapai dalam kampanye?
- 3) Berapa banyak orang yang telah dicapai dalam implementasi kampanye?

c. Evaluasi *Outcome*

Evaluasi *outcome* merupakan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh akibat kampanye. Sekurang-kurangnya ada dua cara untuk mengevaluasi hasil yaitu mencatat situasi dan kondisi sebelum kampanye dilakukan dan setelah kampanye dilakukan.

Pada dasarnya evaluasi *outcomes* berkaitan dengan bagaimana kita mengukur efek dan perubahan yang dihasilkan oleh kampanye, atau mengevaluasi sejauh mana efek suatu kampanye menghasilkan perubahan tertentu (*outcomes* adalah hasil dari hasil, hasil ikutan dari hasil suatu kampanye). Evaluasi *outcomes* dapat dilakukan dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut :

- 1) Apakah kampanye telah mengubah akepsi individu atau komunitas, atau mengubah keyakinan, sikap, dan mengubah norma sosial tertentu?
- 2) Apakah kampanye telah mengubah perilaku individu atau komunitas?
- 3) Apakah kampanye telah mengubah kebijakan tertentu?

d. Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak (*evaluation of impact*) adalah evaluasi untuk mengukur level perubahan yang dialami oleh komunitas atau level perubahan jangka panjang yang mengagregasikan efek perilaku individu lebih lanjut. Beberapa pertanyaan tentang evaluasi dampak yaitu :

- 1) Apakah perubahan perilaku yang telah dicapai itu dimasukkan dengan *outcomes* dari kampanye? Apakah output dari kampanye adalah terjadinya perubahan lanjutan dari efek kampanye, misalnya menurunnya angka penderita kanker, berkurangnya kekerasan, berkurangnya angka kecelakaan lalulintas di area sekolah atau kampus?
- 2) Pada level manakah setiap perubahan itu terjadi?

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengacu pada tiga jurnal penelitian terdahulu mengenai strategi kampanye. Jurnal pertama berjudul Strategi Komunikasi Kampanye Pengendalian Minuman Beralkohol (Perda nomor 11 tahun 2012) oleh Pemerintah Kabupaten Sikka, yang ditulis oleh Polikarpus Manase Mana,dkk, Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin. Jurnal kedua berjudul Strategi Kampanye “Breast Cancer Awarness Month” yang ditulis oleh Alodia Libertine Chandra, Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Petra. Kemudian jurnal ketiga berjudul Strategi Kampanye Partai Golkar Dalam Pemilihan Legislatif Surabaya 2014 ditulis Lukman I. Marpaung, Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga.

Polikarpus Manase,dkk menyatakan bahwa kampanye pengendalian minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tidak melalui suatu perencanaan komunikasi yang baik dan kompherensif. Pemerintah juga tidak melakukan segmentasi dan identifikasi khalayak. Pelaksanaan kampanye mengalami hambatan karena tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah, waktu dan biaya yang terbatas, ego sektor, sistem birokrasi yang panjang, serta adat dan budaya yang masih kental di masyarakat.

Jurnal kedua yang ditulis oleh Alodia Libertine Chandra, menyatakan bahwa adanya kekurangan SDM serta keterbatasan waktu yang dialami oleh Komunitas *Reach to Recovery* Surabaya dalam melaksanakan kampanye *Breast Cancer Awarness Month*. RRC juga memanfaatkan jaringan media sosial, namun hanya

selama pelaksanaan kampanye saja, tidak berkelanjutan. RRC juga belum memiliki tim riset guna mengukur secara pasti efek dari kampanye.

Jurnal ketiga yang ditulis oleh Lukman I. Marpaung, menyatakan bahwa kegagalan Partai Golkar disebabkan oleh faktor perencanaan strategis khususnya pada tim kerja dan perencanaan jadwal kampanye, serta pengaruh faktor lingkungan yaitu adanya apatisme masyarakat, penundaan pemilu dan politik uang.

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena objek yang diteliti berbeda. Peneliti ingin meneliti bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Saptosari untuk mencegah pernikahan dini, karena berhasil menurunkan angka pernikahan dini hingga angka nol di kecamatan tersebut.

**Tabel 1.4**  
**Jurnal Penelitian Terdahulu**

1.	Nama Peneliti	Polikarpus Manase Mana, Hafied Cangara, Muhadar
	Jenis dan Tahun Penelitian	Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.3 No.2 April-Juni 2014
	Judul Penelitian	Strategi Komunikasi Kampanye Pengendalian Minuman Beralkohol (Perda nomor 11 tahun 2012) oleh Pemerintah Kabupaten Sikka

	Metode Penelitian	Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Variabel yang diteliti adalah, strategi komunikasi, proses komunikasi media komunikasi, sasaran komunikasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif
	Temuan Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi bersifat linear melalui pola tatap muka. Semua sektor tidak dilibatkan. Tidak melakukan segmentasi dan identifikasi khalayak. Pelaksanaan kampanye mengalami hambatan karena tingkat pengetahuan dan partisipasi masyarakat yang masih rendah, waktu dan biaya yang terbatas, ego sektor, sistem birokrasi yang panjang, serta adat dan budaya yang masih kental di masyarakat. Kampanye pengendalian minuman beralkohol oleh Pemerintah Kabupaten Sikka tidak melalui suatu perencanaan komunikasi yang baik dan kompherensif.
	Perbedaan	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti yaitu mengenai pengendalian minuman beralkohol
2.	Nama Peneliti	Alodia Libertine Chandra
	Jenis dan Tahun Penelitian	Jurnal E-Komunikasi Vol 2. No.1 Tahun 2014 Universitas Kristen Petra
	Judul Penelitian	Strategi Kampanye “Breast Cancer Awarness Month”
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dan observasi.

	Temuan Penelitian	<p>Peneliti menemukan bahwa dalam menjalankan kampanyenya, komunitas RRS (<i>Reach to Recovery Surabaya</i>) memiliki kekurangan SDM serta keterbatasan waktu, karena mayoritas anggota adalah wanita karir. RRS secara tidak langsung juga melakukan health education melalui beberapa event dalam kampanye mereka. Seperti talk show yang dilakukan di Kompas tv, radio Kosmonita, She, dan lain-lain. Selain itu RRS juga mengadakan health education di kampus-kampus sehingga dapat langsung mengetahui tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai kanker payudara dengan melihat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta peminat konsultasi. RRS menggunakan akun jaringan sosial seperti Facebook dan Twitter, namun akun tersebut hanya aktif digunakan saat kampanye BCAM berlangsung, yaitu setiap bulan Oktober. Selain itu RRC belum memiliki tim riset untuk mengukur secara pasti efek kampanye.</p>
	Perbedaan	<p>Perbedaan terletak pada metode penelitian yang menggunakan studi kasus serta observasi, serta objek penelitian yaitu <i>Breast Cancer Awarness Month</i></p>
3.	Nama Peneliti	Lukman I. Marpaung
	Jenis dan Tahun Penelitian	Jurnal Politik Muda, Vol. 5, No. 2, April-Juli 2016, 171–182 Universitas Airlangga
	Judul Penelitian	Strategi Kampanye Partai Golkar Dalam Pemilihan Legislatif Surabaya 2014
	Metode Penelitian	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif

	Temuan Penelitian	Hasil penelitian menemukan bahwa kegagalan Partai Golkar disebabkan oleh faktor perencanaan strategis khususnya pada tim kerja dan perencanaan jadwal kampanye, serta pengaruh faktor lingkungan yaitu adanya apatisme masyarakat, penundaan pemilu dan politik uang.
	Perbedaan	Penelitian ini meneliti tentang penyebab kegagalan Partai Golkar

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln (2009) dalam Juliansyah (2011:33-34), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia

Creswell (1998) dalam Juliansyah (2011:34) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung (Julainsyah, 2011: 34-35)

## **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di kantor Kecamatan Saptosari Gunung Kidul yang berlokasi di Jalan Wonosari-Panggang, Km.22 Kepek, Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55817. Telp (0274) 7491258

## **3. Informan Penelitian**

Pengambilan informan dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*). Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangan akan memberikan data lebih

lengkap. Praktek seperti inilah yang disebut sebagai “*serial selection of sample units*” (Lincoln dan Guba, 1985 dalam Sugiyono, 2005:54-55)

Dalam penelitian ini, penulis memerlukan informasi dari pihak-pihak yang memahami segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan kampanye deklarasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Saptosari. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini telah ditetapkan agar dapat memudahkan dalam memberikan informasi.

a. Kriteria informan pelaksana kampanye :

- 1) Bekerja di pemerintah kecamatan Saptosari
- 2) Memahami dan terlibat dalam perencanaan kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Saptosari
- 3) Memahami dan terlibat dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Saptosari

b. Kriteria Informan sebagai stakeholder kampanye atau masyarakat:

- 1) Tinggal di wilayah kecamatan Saptosari
- 2) Terlibat dalam pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Saptosari

Berdasarkan kriteria informan tersebut, maka informan yang akan diwawancarai oleh penulis agar menghasilkan hasil penelitian yang obyektif adalah :

- a. Camat Saptosari
- b. Kepala Puskesmas Saptosari
- c. Kepala KUA Saptosari
- d. LSM Rifka Annisa
- e. Kesiswaan SMP Saptosari
- f. Siswa SMP (2-3 orang)
- g. Masyarakat (2-3 orang)

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data yang terdapat pada jenis penelitian kualitatif, yaitu :

- a. Wawancara

Menurut Deddy Mulyana (2001:180), Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara tak terstruktur disebut juga wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (openended interview), wawancara etnografis.

Wawancara tak terstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan kondisi saat

wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dsb) responden yang dihadapi.

Dalam proses ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pihak Pemerintah Kecamatan dan Muspika Saptosari selaku pihak yang terkait dalam kegiatan kampanye pencegahan pernikahan dini, serta masyarakat selaku stakeholder kampanye.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2009 dalam Herdiansyah, 2014:143)

Dalam kegiatan studi dokumentasi, pengumpulan data dilakukan dari dokumen Pemerintah Kecamatan Saptosari, KUA dan Puskesmas Saptosari yang berupa buku-buku, foto kegiatan, notulen rapat, surat-surat, laporan-laporan maupun literatur yang relevan. Data yang diambil berupa data otentik dari kegiatan-kegiatan kampanye

Pemerintah Kecamatan Saptosari 2015-2016, data mengenai konsep program beserta daftar kegiatan didalamnya, dan implementasi strategi kampanye yang diterapkan di kegiatan-kegiatan promosi tersebut.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2005:89)

Dalam hal ini Nasution (1998) dalam Sugiyono (2005:89) menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

### **a. Analisis sebelum di lapangan**

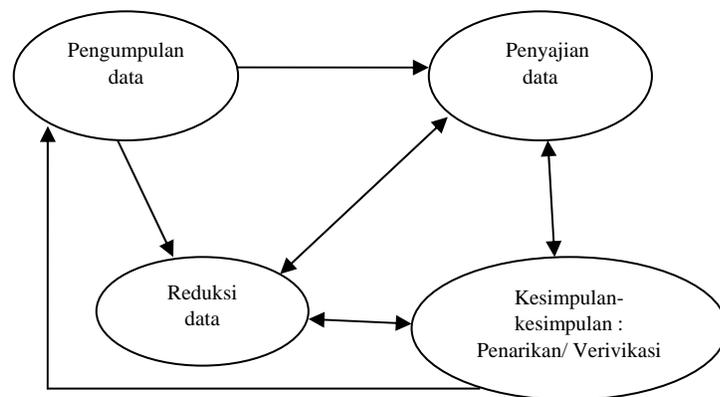
Analisis data dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus menentukan penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.

b. Analisis selama di lapangan

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005:91) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Gambar 1.2



Hubungan antara Analisis Data dengan Pengumpulan Data Menurut Miles dan Huberman, Afrizal (2016:180)

1) Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan

gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

## 2) Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2005:95) menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3) Conclusion Drawing/ Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan penjelasan mengenai teknik analisis data diatas, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data, memilah, dan mengorganisir data sehingga dapat membentuk suatu kesimpulan untuk mengetahui Strategi Kampanye Pencegahan Pernikahan Dini, Perceraian, dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Oleh Pemerintah Kecamatan Saptosari Tahun 2015-2016 Kabupaten Gunung Kidul DIY.

## **6. Validitas Data**

Menurut Afrizal (2016:167-168), penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan prosedur yang didasari dan terkontrol. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif, bukan sedikit-banyaknya informan yang menentukan validitas data yang terkumpul, melainkan salah satunya adalah ketepatan atau kesesuaian sumber data dengan data yang diperlukan. Salah satu teknik memperoleh data yang valid dalam penelitian kualitatif adalah penggunaan teknik triangulasi.

Triangulasi berarti segitiga, tetapi tidak berarti informasi cukup dicari dari tiga sumber saja. Prinsipnya adalah, menurut teknik triangulasi, informasi mestilah dikumpulkan atau dicari dari sumber-sumber yang berbeda agar tidak bias sebuah kelompok. Sehubungan dengan hal itu, pertanyaan

yang harus ditanyakan oleh peneliti kepada dirinya untuk menerapkan teknik triangulasi tersebut adalah :

- a. Mungkinkah orang lain mempunyai pendapat yang berbeda?
- b. Adakah sumber lain yang dapat dicari untuk mengecek kebenaran informasi ini?
- c. Adakah dokumen-dokumen yang mungkin membantu untuk mengetahuinya lebih tepat?

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara membandingkan hasil wawancara dari informan baik dari pihak pemerintah selaku pelaksana kampanye dengan masyarakat selaku stakeholder. Kemudian peneliti juga akan membandingkan dengan isi dokumentasi yang telah dikumpulkan. Setelah proses triangulasi data dilakukan, kemudian data disajikan dan ditarik menjadi kesimpulan dan saran.